



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI
UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT**

Oleh :

REVI PUTRI RUWINDA
05 951 030

Mahasiswa Program Strata Satu (S - 1) Jurusan Ilmu Ekonomi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**PADANG
2010**





No.Alumni Universitas

REVI PUTRI RUWINDA

No.Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat/Tgl lahir: Pariaman, 21 Maret 1987 b). Nama Orang Tua: Erwin, SE c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No.Bp: 05 951 030 f). Tgl Lulus: 10 Februari 2010 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,12 i). Lama Studi: 4 tahun 5 bulan j). Alamat Orang Tua: Komp. Parupuk Raya Blok G no. 02 Tabing, Padang-Sumatera Barat

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Kripsi SI Oleh: Revi Putri Ruwinda

Pembimbing: Drs. H. Zulkarnaini Ras

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Barat, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis ekonometrika. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2001 sampai tahun 2007. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil regresi yang dilakukan, diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel belanja daerah dengan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Namun, pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil temuan di atas, penulis menyarankan agar Pemerintah kabupaten/kota mampu secara mandiri dalam membiayai belanja daerah tanpa bergantung kepada pemerintah pusat, dan menggali sumber daya ekonomi yang potensial.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 10 Februari 2010. Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji:

Tanda Tangan			
Nama Terang	Drs. H. Zulkarnaini Ras (Pembimbing)	Drs. Wirzon. B. M.S (Pembahas I)	Neng Kamarni, SE, M.Si (Pembahas II)

Mengetahui

Jurusan Ilmu Ekonomi: Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Fc,DEA,Ing
NIP. 130812952

Tanda Tangan

Penulis telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus:

Petugas Fakultas / Universitas Andalas		
Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi daerah ini selaras dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Sampai saat ini otonomi daerah sudah berjalan di tiap kabupaten dan kota di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Simanjuntak dalam Ndadari dan Adi, 2008). Dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pendapatan lain – lain yang sah.

Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk pemerintah daerahnya.

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya.

Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Otonomi Daerah. Salah satunya UU 5/1974 yang menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Berikutnya di bawah UU 22/1999 dianut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut Kuncoro perbedaan antara otonomi daerah pada UU 5/1974 dengan UU 22/1999 adalah bahwa pada UU 5/1974 hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan UU 22/1999 otoda merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut Kuncoro hal ini menerangkan bahwa UU lama menganut unsur kewajiban. UU baru, menekankan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan menekankan pada pentingnya aspirasi masyarakat, namun UU baru tidak menyebutkan otonomi daerah sebagai hak (2004:22).

Dalam konteks ekonomi, pemerintah merupakan pelaku penting dalam perekonomian suatu negara terutama di negara sedang berkembang. Salah satu peran strategis pemerintah dalam perekonomian diimplementasikan dalam bentuk kebijaksanaan fiskal. Kebijaksanaan fiskal berkaitan dengan tindakan pemerintah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Belanja daerah merupakan suatu rencana keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dengan dana yang bersumber dari PAD disamping bantuan dari pemerintah pusat. Dengan demikian maka tingkat kemajuan pembangunan suatu daerah dengan daerah lain tidak sama, karena tergantung potensi yang tersedia di daerah tersebut.
2. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa secara serempak PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dengan meningkatnya jumlah PAD dan DAU pada suatu daerah akan menyebabkan peningkatan pada belanja daerah.
3. Pada pengujian pengaruh PAD terhadap belanja daerah secara individual menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Disebabkan karena rendahnya proporsi PAD dibanding besarnya transfer yang diberikan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
4. Pada pengujian pengaruh DAU terhadap belanja daerah menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin besar jumlah DAU, maka semakin besar pula jumlah belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2006. "Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan" dalam
- Alfirman, Luky dan Edy Sutriyono. 2006. "Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression" dalam Jurnal Keuangan Publik Vol. 4, No. 1.
- Amri, Hendrawati. 2005. "Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat" dalam Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPS, 2001-2007. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta.
- BPS, 2001-2007. Sumatera Barat Dalam Angka. Padang.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks.
- Dewi, Elita. 2002. "Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah" dalam Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Fuadi, Luthfi. 2009. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Padang)" dalam Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Gudjarati, Damodar. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.